

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa adat dalam mengelola perekonomian masyarakat adatnya mempunyai lembaga yang dinamakan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) adalah Entitas komersial yang dimiliki oleh kota-kota tradisional yang bergerak dalam bisnis simpan pinjam. LPD adalah nama dari 4.444 perusahaan simpan pinjam milik masyarakat desa adat Bali. Ini adalah sarana ekonomi desa. LPD Bali dikembangkan pada tahun 1985 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Bali

No. 972 Tahun 1984. Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Bali No. 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Rakyat untuk melindungi kemandirian seluruh aspek kehidupan adat di Desa, dipandang perlu memperkuat Keuangan Desa sebagai sarana Mendukung ke Mendirian badan usaha milik desa LPD (Sri dkk., 2023).

Peran LPD sangatlah penting dalam meminjam modal kepada masyarakat untuk mengembangkan suatu usaha. Berbagai kalangan masyarakat yang memperhatikan perekonomian Bali berharap agar perekonomian Bali kedepannya mampu lebih memanfaatkan potensi lokal di dalam membangun perekonomian Bali. Melihat pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di daerah pedesaan masih tergolong kecil, maka di daerah pedesaan didirikan suatu lembaga perkreditan yang dikenal dengan Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Di daerah Bali khususnya

pemerintah sudah mengambil suatu kebijakan pengembangan Lembaga Perkreditan Desa (Handayani dkk., 2022). Selain itu, LPD juga berperan dalam menghilangkan praktik eksploitasi dalam hubungan kredit, memberikan kesempatan yang setara bagi semua warga desa untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi (Handayani dkk., 2022).

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan lembaga keuangan mikro berbasis adat yang berperan penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa di Bali, termasuk di Kabupaten Bangli. Keberadaan LPD tidak hanya berfungsi sebagai penyedia jasa keuangan, tetapi juga sebagai penggerak pembangunan berbasis kearifan lokal. Sebagai salah satu kabupaten di Bali yang masih kental dengan adat dan tradisi, Kabupaten Bangli memiliki jumlah LPD yang cukup signifikan pada tahun 2022. Jumlah dan persebaran LPD di setiap kecamatan menunjukkan tingkat partisipasi dan kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan desa yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat adat. Berikut merupakan jumlah persebaran LPD di Kabupaten Bangli pada Tahun 2022 yang dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Jumlah LPD di Kabupaten Bangli Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah	Rata-Rata Aset	Rata-Rata Laba
1	Bangli	23	15.064.916	401.748
2	Tembuku	36	13.958.781	310.938
3	Susut	39	14.145.873	260.022
4	Kintamani	61	9.583.078	244.226
	Total	159		

(Sumber: LPLPD Kabupaten Bangli, 2025)

Berdasarkan data pada Tabel 1.1 jumlah Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Bangli pada tahun 2024 tersebar di empat kecamatan dengan total sebanyak 159 LPD. Kecamatan Kintamani memiliki jumlah LPD terbanyak yaitu

sebanyak 61 LPD, disusul oleh Kecamatan Susut dengan 39 LPD, Kecamatan Tembuku sebanyak 36 LPD, dan yang paling sedikit terdapat di Kecamatan Bangli dengan jumlah 23 LPD. Distribusi ini mencerminkan peran strategis LPD dalam mendukung perekonomian desa, khususnya di wilayah-wilayah dengan jumlah desa adat yang lebih banyak seperti di Kecamatan Kintamani.

Kecamatan Kintamani tercatat sebagai wilayah dengan jumlah LPD terbanyak di Kabupaten Bangli pada tahun 2024, yakni sebanyak 61 LPD. Banyaknya jumlah LPD di kecamatan ini mencerminkan tingginya potensi ekonomi dan keberadaan desa adat yang cukup besar. Meskipun demikian, rata-rata aset dan laba yang dimiliki LPD di Kecamatan Kintamani justru tercatat paling rendah dibandingkan kecamatan lainnya, yaitu dengan rata-rata aset sebesar Rp 9.583.078 dan rata-rata laba sebesar Rp 244.226. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara kuantitas LPD di Kintamani mendominasi, namun dari sisi kualitas kinerja keuangan dilihat dari aset dan laba rata-rata per LPD masih tergolong rendah.

Namun, di balik jumlah yang melimpah tersebut, tidak sedikit LPD yang menghadapi berbagai permasalahan, baik dari segi manajerial, kepatuhan terhadap prinsip tata kelola, hingga persoalan akuntabilitas dan transparansi keuangan. Permasalahan ini dapat berdampak pada menurunnya kepercayaan krama desa terhadap lembaga adat tersebut, sehingga diperlukan upaya evaluasi dan penguatan kapasitas kelembagaan untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas peran LPD dalam mendukung kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Kintamani. LPD memiliki peran strategis dalam memperkuat struktur ekonomi masyarakat adat di Bali, termasuk di Kecamatan Kintamani. Namun, keberadaan LPD tidak hanya dinilai dari jumlahnya, melainkan juga dari kondisi kesehatannya. Penilaian

kesehatan LPD menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana lembaga ini mampu menjalankan fungsinya secara optimal dan berkelanjutan. Oleh karena itu, data kesehatan LPD yang dikeluarkan oleh LPLPD dapat memberikan gambaran nyata mengenai kondisi aktual yang dihadapi masing-masing LPD. Berikut merupakan data kesehatan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Kintamani yang dijelaskan pada tabel 2.

Tabel 1.2 Data Kesehatan LPD di Kecamatan Kintamani 2022-2024

No	Kategori	2022	2023	2024
1	Sehat	39	38	32
2	Cukup Sehat	12	9	8
3	Kurang Sehat	4	8	3
4	Tidak Sehat	2	2	2
5	Macet	4	4	7
6	Tidak Setor Laporan	-	-	9
	Total	61	61	61

Berdasarkan data dari Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LPLPD) pada tabel 2, terlihat bahwa jumlah LPD yang berstatus Sehat di Kecamatan Kintamani mengalami penurunan dari tahun ke tahun, yakni dari 39 unit pada tahun 2022 menjadi 32 unit pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan adanya penurunan kinerja dan/atau tantangan dalam pengelolaan LPD secara umum. Sementara itu, jumlah LPD dalam kategori Cukup Sehat dan Kurang Sehat juga mengalami fluktuasi, namun cenderung menurun secara keseluruhan, yang bisa menunjukkan adanya perbaikan atau justru pergeseran ke kategori yang lebih rendah seperti Tidak Sehat atau Macet. Hal yang mengkhawatirkan adalah peningkatan jumlah LPD yang masuk dalam kategori Macet, dari 4 unit pada tahun 2022 menjadi 7 unit pada tahun 2024, serta munculnya 9 LPD yang tidak menyetor laporan di tahun 2024, yang sebelumnya tidak ada. Kondisi ini menunjukkan

adanya permasalahan serius dalam pelaporan dan pengelolaan LPD, yang dapat berdampak pada pertumbuhan Aset dan laba LPD.

Kondisi kesehatan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Kintamani menunjukkan bahwa dari 61 LPD yang ada, sebagian besar berada dalam kategori sehat. Namun, terdapat pula LPD yang masuk dalam kategori kurang sehat, tidak sehat, dan bahkan macet. Permasalahan kesehatan ini tidak hanya berdampak pada operasional harian, tetapi juga memengaruhi aspek keuangan seperti aset dan laba. Penelitian oleh Widiastuti dan Sudarma (2020) menunjukkan bahwa pertumbuhan aset dapat memediasi hubungan antara kesehatan LPD dan profitabilitas. Artinya, LPD yang sehat cenderung mengalami pertumbuhan aset yang positif, yang pada gilirannya meningkatkan laba. Sebaliknya, LPD yang kurang sehat atau tidak sehat mungkin menghadapi stagnasi atau penurunan aset, yang dapat mengurangi profitabilitas. Oleh karena itu, penting bagi LPD di Kecamatan Kintamani untuk memperkuat aspek kesehatan keuangannya guna memastikan pertumbuhan aset dan laba yang berkelanjutan.

Kasus-kasus penyimpangan pengelolaan keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, mencerminkan lemahnya sistem pengawasan dan tata kelola yang berisiko menurunkan kinerja lembaga, baik dari sisi aset maupun laba. Salah satu kasus yang mencuat adalah di LPD Langgahan, di mana mantan bendahara, I Made Mariana, diduga melakukan korupsi sebesar Rp2.740.136.000 selama periode 2009 hingga 2018. Dana tersebut disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, termasuk berjudi sabung ayam (tajen), yang menyebabkan kerugian besar bagi lembaga (Kompas, 2022; Radar Bali, 2022). Selain itu, dugaan korupsi juga terjadi di LPD Selulung, dengan kerugian

awal ditaksir mencapai Rp1.165.000.000. Ketua dan bendahara LPD yang merupakan pasangan suami-istri diduga turut terlibat dalam pengelolaan dana secara tidak transparan dan tidak akuntabel (NusaBali, 2024). Tidak hanya itu, permasalahan administrasi juga ditemukan di LPD Desa Adat Pinggan, di mana pengurus belum memahami secara baik mekanisme hukum perjanjian kredit, khususnya terkait jaminan fidusia, sehingga menimbulkan risiko hukum dan melemahkan struktur legal kredit yang diberikan (Warmadewa Journal, 2021). Kasus-kasus tersebut berdampak signifikan terhadap penurunan kepercayaan masyarakat, yang secara langsung dapat menurunkan jumlah simpanan, pinjaman yang disalurkan, serta laba bersih yang diperoleh. Kerugian akibat penyalahgunaan dana dan lemahnya sistem tata kelola juga menyebabkan penurunan nilai aset produktif dan meningkatkan beban biaya karena adanya penanganan hukum, yang pada akhirnya mengganggu stabilitas keuangan LPD secara keseluruhan.

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan mikro yang didirikan untuk melayani kebutuhan finansial masyarakat di Bali. LPD berperan penting dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal dengan menyediakan layanan simpan pinjam yang mudah diakses oleh masyarakat desa. Sebagai lembaga berbasis adat, LPD tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, tetapi juga untuk menjaga nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal yang menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat setempat. Dalam menjalankan pengelolaan keuangan diperlukan adaptasi terhadap perkembangan globalisasi salah satunya dengan digitalisasi. Digitalisasi menjadi salah satu faktor kunci dalam peningkatan efisiensi pengelolaan keuangan LPD. Dengan adanya aplikasi digital, LPD dapat

mempermudah proses transaksi dan pelaporan keuangan, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Digitalisasi tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah yang mendukung digitalisasi sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kinerja lembaga keuangan mikro seperti LPD (Sari dkk., 2023).

Resource-Based Theory (RBT) menekankan bahwa keunggulan kompetitif ditentukan oleh kemampuan organisasi mengelola sumber daya (Barney, 1991). Dalam konteks LPD, digitalisasi menjadi sumber daya strategis untuk meningkatkan efisiensi, akurasi transaksi, dan kualitas layanan, sehingga mendorong pertumbuhan aset dan laba. Dukungan pemerintah sebagai sumber daya eksternal melalui regulasi, infrastruktur digital, pelatihan SDM, dan insentif juga memperkuat daya saing. Sinergi keduanya menciptakan keunggulan kompetitif berkelanjutan yang berdampak positif pada kinerja keuangan LPD di Kecamatan Kintamani.

Digitalisasi merujuk pada kemajuan teknologi yang terkait dengan penggunaan internet dan teknologi informasi, yang membuka kemungkinan baru dengan adanya perangkat canggih untuk mempermudah pengguna. Sementara digitalisasi merupakan proses transformasi dari teknologi mekanik dan elektronik analog menjadi teknologi digital (Wibowo dkk., 2023). Digitalisasi adalah proses mengubah media tercetak, audio, dan video menjadi digital. Ini dilakukan untuk membuat arsip dokumen digital, dan memerlukan peralatan seperti komputer, *scanner*, operator media sumber, dan *software* pendukung. Dengan digitalisasi, koperasi akan melakukan penyesuaian tata kelola perusahaan dari praktik

tradisional menjadi praktik modern. Digitalisasi memungkinkan pengelola koperasi untuk mengelola keuangan. Misalnya, aplikasi pembukuan, toko daring, dan pembayaran daring (Anshari & Manjaleni, 2024). Digitalisasi tidak hanya memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana, tetapi juga meminimalkan potensi penyalahgunaan anggaran. Sebagai contoh, LPD Desa Adat Lukluk di Bali telah mengimplementasikan sistem digital yang menggantikan buku tabungan fisik dengan buku elektronik, di mana nasabah menerima notifikasi langsung setelah melakukan transaksi.

Dalam era transformasi digital yang semakin pesat, digitalisasi menjadi kunci utama dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan lembaga keuangan, termasuk Lembaga Perkreditan Desa (LPD). LPD sebagai institusi keuangan yang berbasis komunitas adat di Bali memiliki peran strategis dalam pemberdayaan ekonomi lokal dan inklusi keuangan masyarakat desa. Untuk mengatasi masalah ini, digitalisasi dalam pengelolaan LPD sangat diperlukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memudahkan pemantauan transaksi secara *real-time*, serta menaikkan laba dan aset pada LPD. Hal ini sejalan dengan penelitian (Ula, 2023) yang menyatakan bahwa digitalisasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Adanya pemahaman yang memadai tentang teknologi informasi bagi aparat desa dapat mengelola serta menyajikan informasi laporan secara akuntabel dan meningkatkan tingkat efektivitas serta efisiensi.

Tren terkini menunjukkan bahwa digitalisasi di LPD tidak hanya mempercepat proses transaksi dan layanan keuangan, tetapi juga meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta pengelolaan risiko yang lebih baik. Digitalisasi di LPD tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional dan layanan kepada masyarakat, tetapi

juga memperkuat tata kelola dan transparansi lembaga tersebut. Penelitian oleh Priyanto dan Purwanto (2022) menyoroti pentingnya penerapan teknologi informasi dalam proses pemberian kredit di LPD, yang dapat mempercepat pelayanan dan mengurangi risiko kesalahan administrasi. Selain itu, transformasi digital juga memungkinkan LPD untuk beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat modern tanpa menghilangkan nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi ciri khasnya (Priyanto & Purwanto, 2022). Digitalisasi di LPD menjadi kebutuhan strategis untuk meningkatkan efisiensi operasional, transparansi, dan kualitas layanan kepada masyarakat desa adat. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi digital dan aplikasi *mobile banking* di LPD mampu mempercepat proses transaksi, meminimalkan risiko kesalahan administrasi, serta meningkatkan kepuasan nasabah (Sukarta dkk., 2024).

Selain itu, transformasi digital juga berperan penting dalam pemberdayaan LPD dengan tetap mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi ciri khas lembaga ini (Priyanto & Purwanto, 2022). Studi lain menegaskan bahwa efektivitas sistem informasi akuntansi yang didukung teknologi digital berkontribusi positif terhadap kinerja dan keberlanjutan LPD (Pratama & Widhiyani, 2021). Dengan demikian, digitalisasi LPD tidak hanya mencerminkan tren terkini dalam pengelolaan lembaga keuangan mikro, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam menghadapi tantangan ekonomi dan sosial di era digital. Penelitian Kurniawan dkk. (2021) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan dari transformasi digital dan inovasi terhadap kinerja perusahaan. Selanjutnya, penelitian Fadhilah & Darmawati (2023) menyatakan Digitalisasi layanan berdampak besar pada kinerja keuangan koperasi syariah yang tumbuh seiring dengan kemajuan teknologinya.

Namun, penelitian Kurniawati dkk. (2024) menyatakan digitalisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap laba yang diukur melalui ROA.

Dukungan pemerintah terhadap digitalisasi LPD terlihat dari berbagai program dan kebijakan yang diluncurkan untuk memfasilitasi transformasi digital ini. Pemerintah menyediakan aplikasi dan pelatihan bagi pengelola LPD agar dapat memanfaatkan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan. Dengan demikian, LPD dapat lebih responsif terhadap kebutuhan nasabah dan mengurangi ketergantungan pada metode tradisional dalam pengelolaan dana (Sari dkk., 2023). Pemerintah Provinsi Bali mendirikan LPD untuk mendukung pengembangan sumber daya budaya, sosial, dan ekonomi di Bali. Regulasi mengenai LPD diatur oleh Perda Provinsi Bali No. 8 Tahun 2002. Sukandia (2012) menyatakan peran Pemerintah Daerah Bali dalam pembinaan dan pengembangan LPD sebagai lembaga perekonomian komunitas. Pemerintah berperan sebagai pengatur, pendukung, dan pengawas dalam pengelolaan LPD. Peran ini mencakup penetapan persyaratan pendirian, standar pengelolaan, serta penyediaan bantuan permodalan dan fasilitas lainnya.

Dukungan pemerintah memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan aset dan laba Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Melalui regulasi yang jelas seperti Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017, pemerintah memberikan landasan hukum yang kuat bagi operasional LPD, sekaligus memastikan sistem pengawasan dan tata kelola yang akuntabel. Selain itu, bentuk dukungan nyata juga diwujudkan melalui pelatihan, pendampingan manajerial, serta fasilitasi teknologi informasi guna meningkatkan efisiensi layanan LPD. Dengan adanya intervensi positif dari pemerintah, LPD mampu mengelola dana

masyarakat dengan lebih profesional, memperluas portofolio pinjaman, serta mendorong pertumbuhan aset secara berkelanjutan. Konsekuensinya, laba LPD juga menunjukkan pertumbuhan seiring dengan kepercayaan masyarakat dan kapasitas kelembagaan yang makin baik. Dukungan ini mencerminkan sinergi antara lembaga keuangan berbasis adat dan pemerintah daerah dalam memperkuat ekonomi desa secara inklusif dan berkelanjutan. Hal ini berpotensi meningkatkan aset dan laba LPD, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat desa. Penelitian Perdana dkk. (2023) menyatakan dukungan pemerintah mempengaruhi pertumbuhan usaha. Selanjutnya penelitian Saputra dkk. (2019) dukungan pemerintah mempengaruhi pendapatan suatu instansi daerah. Namun, penelitian Samira dkk. (2023) menyatakan dukungan Pemerintah tidak berpengaruh terhadap kinerja suatu usaha.

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan institusi keuangan mikro berbasis adat yang memiliki peran strategis dalam menopang perekonomian masyarakat desa di Bali, khususnya di Kabupaten Bangli. Meskipun jumlah LPD di Kecamatan Kintamani tergolong tinggi, yaitu 61 LPD pada tahun 2022, namun tidak semua LPD menunjukkan kinerja yang sehat. Data menunjukkan adanya LPD yang masuk dalam kategori kurang sehat, tidak sehat, bahkan macet. Kondisi ini mengindikasikan adanya persoalan mendasar dalam aspek tata kelola, manajemen keuangan, hingga akuntabilitas lembaga. Kasus-kasus penyalahgunaan dana dan lemahnya sistem pengawasan, seperti yang terjadi di LPD Langgahan dan LPD Selulung, semakin menegaskan perlunya evaluasi mendalam terhadap sistem pengelolaan LPD. Selain itu, tantangan globalisasi dan transformasi digital menuntut LPD untuk beradaptasi guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan

kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana strategi penguatan kelembagaan, penerapan tata kelola yang baik, serta pemanfaatan digitalisasi dapat meningkatkan kesehatan dan kinerja LPD, guna mendukung pembangunan ekonomi berbasis kearifan lokal secara berkelanjutan.

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) telah lama menjadi kekuatan ekonomi berbasis adat yang mengakar kuat di Bali, penelitian terkait kesehatan dan keberlanjutan LPD masih menyisakan sejumlah celah penting. Sebagian besar studi sebelumnya cenderung hanya menyoroti peran LPD secara umum dalam meningkatkan perekonomian desa, tanpa mengevaluasi secara lebih spesifik dinamika penurunan kinerja keuangan dan status kesehatan LPD yang saat ini semakin mengkhawatirkan. Data terbaru menunjukkan penurunan signifikan jumlah LPD yang tergolong sehat, termasuk di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, yang justru memiliki jumlah LPD terbanyak. Fenomena ini mengindikasikan adanya persoalan mendasar dalam aspek tata kelola, pengawasan, dan kepercayaan masyarakat, namun belum banyak kajian akademik yang mendalami faktor-faktor tersebut secara terintegrasi. Bahkan, hubungan antara turunnya kepercayaan masyarakat terhadap LPD dengan menurunnya simpanan dan partisipasi keuangan belum dianalisis secara empiris dalam studi-studi terdahulu. Begitu pula, peran LPLPD sebagai lembaga pembina belum banyak dievaluasi efektivitasnya dalam membina dan menyelamatkan LPD dari kondisi tidak sehat. Dengan demikian, terdapat celah penelitian yang signifikan terkait analisis menyeluruh atas penurunan kinerja LPD dari aspek keuangan, kelembagaan, dan sosial budaya masyarakat adat Bali.

Perkembangan digitalisasi keuangan dan komitmen pemerintah dalam mendukung transformasi ekonomi berbasis desa masih belum optimal dimanfaatkan oleh sebagian besar LPD. Pemerintah Provinsi Bali dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mendorong digitalisasi sektor keuangan, termasuk mendorong penggunaan sistem keuangan berbasis aplikasi, pelaporan digital, dan integrasi pengawasan berbasis teknologi. Namun, belum ada cukup penelitian yang menelaah bagaimana kesiapan LPD dalam merespons arah kebijakan ini, dan apakah digitalisasi mampu menjadi solusi atas lemahnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana di LPD. Di sisi lain, tantangan struktural seperti rendahnya literasi digital aparat LPD, keterbatasan infrastruktur teknologi di desa, serta resistensi budaya terhadap perubahan, justru berpotensi memperlebar kesenjangan. Penelitian mengenai isu ini menjadi sangat krusial di tengah tantangan sosial-ekonomi Bali. Ketergantungan Bali terhadap sektor pariwisata telah menunjukkan kerentanannya ketika terjadi krisis, sehingga penguatan lembaga keuangan lokal seperti LPD menjadi salah satu alternatif strategis dalam membangun kemandirian ekonomi berbasis komunitas. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi krusial untuk mengisi kekosongan literatur mengenai bagaimana transformasi kelembagaan, dukungan teknologi, dan penguatan tata kelola dapat mendorong pemulihan dan keberlanjutan LPD dalam menghadapi tantangan ekonomi dan sosial yang kompleks di era digital.

Penelitian ini memiliki kontribusi kebaruan (*novelty*) dalam kajian Lembaga Perkreditan Desa (LPD), khususnya di wilayah Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Berbeda dengan studi sebelumnya yang lebih banyak menyoroti aspek kesehatan keuangan LPD secara umum atau kasus penyimpangan pengelolaan

dana, penelitian ini secara spesifik menguji pengaruh digitalisasi, dukungan Pemerintah terhadap pertumbuhan aset dan laba LPD. Sampai saat ini, belum terdapat penelitian yang secara komprehensif menguji hubungan antar ketiga variabel tersebut dalam konteks LPD berbasis adat seperti di Bali. Sebagian besar kajian yang ada masih bersifat deskriptif dan belum mengintegrasikan faktor internal (seperti digitalisasi dan kesehatan LPD) serta faktor eksternal (seperti dukungan pemerintah) ke dalam suatu model empiris yang dapat menjelaskan kinerja keuangan LPD secara lebih menyeluruh. Dengan mengacu pada pendekatan *Resource-Based Theory (RBT)*, penelitian ini berupaya menjelaskan bagaimana kombinasi sumber daya internal dan eksternal dapat memengaruhi keunggulan kompetitif LPD melalui pertumbuhan aset dan laba. Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Hubungan Dampak Digitalisasi Dan Dukungan Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Aset Dan Laba LPD (Studi Pada Lembaga Perkreditan Desa Sekecamatan Kintamani”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas adapun identifikasi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Meskipun jumlah LPD di Kecamatan Kintamani tergolong tinggi, rata-rata aset dan laba yang dimiliki LPD di Kecamatan Kintamani justru tercatat paling rendah dibandingkan kecamatan lainnya, yaitu dengan rata-rata aset sebesar Rp 9.583.078 dan rata-rata laba sebesar Rp 244.226.

2. Peningkatan jumlah LPD yang masuk dalam kategori Macet, dari 4 unit pada tahun 2022 menjadi 7 unit pada tahun 2024, serta munculnya 9 LPD yang tidak menyetor laporan di tahun 2024
3. Terdapat kasus-kasus penyalahgunaan dana dan lemahnya sistem pengawasan pada beberapa LPD, seperti LPD Langgahan dan LPD Selulung, yang menyebabkan kerugian besar dan berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat desa. Permasalahan ini mengganggu stabilitas keuangan LPD serta menghambat fungsi sosial dan ekonominya.
4. Di tengah tantangan globalisasi dan tuntutan efisiensi, LPD menghadapi kebutuhan untuk bertransformasi secara digital. Namun, tidak semua LPD mampu beradaptasi dengan teknologi informasi secara optimal. Digitalisasi yang belum merata menjadi hambatan dalam peningkatan transparansi, efisiensi pelayanan, dan daya saing lembaga di tengah masyarakat.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan indentifikasi masalah diatas, maka untuk mendapatkan hasil penelitian yang terfokus dan menghindari suatu penafsiran yang tidak diinginkan, penelitian ini hanya berfokus menganalisis pengelolaan keuangan LPD Kecamatan Kintamani berupa dampak digitalisasi dan dukungan pemerintah terhadap pertumbuhan aset dan laba.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Apa Hubungan Digitalisasi Terhadap Pertumbuhan Aset dan laba pada LPD di Kecamatan Kintamani?
2. Apa Hubungan Dukungan Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Aset dan Laba pada LPD di Kecamatan Kintamani?

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Menganalisis hubungan antara digitalisasi dan pertumbuhan Aset dan laba Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Kintamani.
2. Menganalisis hubungan antara dukungan Pemerintah dan pertumbuhan Aset dan laba LPD di Kecamatan Kintamani.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi bahan informasi serta mampu memperluas wawasan terkait untuk memahami pengelolaan keuangan yang dilaksanakan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD).

1.6.2 Manfaat Praktis

- a) Bagi LPD Se-Kecamatan Kintamani

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada LPD se-Kecamatan Kintamani dalam pengembangan pengelolaan keuangan dana LPD

karena akan berdampak juga kepada pemerintah desa sebagai penanggungjawab serta dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya.

b) Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan pengetahuan serta wawasan mahasiswa serta mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai analisis pengelolaan keuangan LPD Kecamatan Kintamani: dampak digitalisasi dan dukungan pemerintah terhadap pertumbuhan aset dan laba.

c) Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber referensi keperpustakaan bagi para peneliti kedepannya. Memberikan kontribusi ilmiah dan tambahan bukti empiris mengenai analisis pengelolaan keuangan LPD Kecamatan Kintamani: dampak digitalisasi dan dukungan pemerintah terhadap pertumbuhan aset dan laba.

